

BAB I

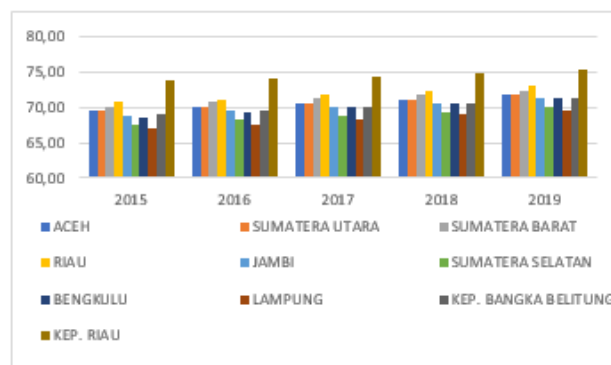
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang dipakai untuk mengukur kemajuan pembangunan kualitas hidup manusia sebagaimana yang diungkapkan dalam teori *human capital* oleh Gary S Becker jika manusia bukan hanya sumber daya tetapi dapat berbentuk modal. Modal manusia sangat penting, yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, atau dengan adanya kebiasaan baik yang terus bertambah di kehidupan untuk menunjang produktivitasnya. Teori *human capital* ini didukung pula oleh teori lingkaran setan kemiskinan menurut Nurkse pada tahun 1953 yaitu tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, yang menyebabkan penurunan investasi publik di sektor pendidikan dan kesehatan, yang dapat menghambat proses peningkatan IPM hingga dapat menyebabkan produktivitas yang rendah dan meningkatnya angka kemiskinan.

Provinsi Lampung merupakan satu dari sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 2 Kota, sehingga dapat memberikan grafik pembangunan manusia yang bervariasi. Menurut BPS (2020), pada tahun 2019 Provinsi Lampung memiliki tingkat IPM paling rendah yang menempati urutan 10 diantara provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Seperti yang dapat dilihat pada grafik 1 berikut :

Grafik 1. IPM Provinsi di Pulau Sumatera 2015-2019

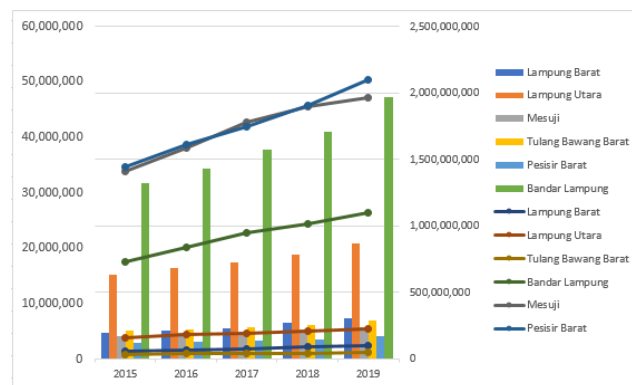


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2021

Grafik diatas menunjukkan, perkembangan IPM di Provinsi Lampung terus meningkat terlihat dari persentase angka IPM yang terus meningkat secara konsisten dari tahun 2015-2019. Angka IPM Lampung pada tahun 2019 sebesar 69,57. Namun demikian, peningkatan tersebut masih berada dibawah capaian IPM provinsi lain di Pulau Sumatera. Angka tersebut belum cukup kuat untuk meningkatkan peringkat IPM Provinsi Lampung kepada posisi yang diharapkan, yang artinya hal ini masih membuat kondisi pembangunan manusia pada provinsi Lampung tertinggal dari provinsi lainnya di pulau Sumatera yang mengindikasikan bahwa belum meratanya pembangunan dan investasi publik dalam sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan di Provinsi Lampung.

IPM Provinsi Lampung tidak seharusnya lebih kecil dari provinsi lain di Pulau Sumatera. Lokasinya yang strategis berdekatan dengan ibu kota provinsi DKI Jakarta menjadikan Lampung sebagai provinsi paling strategis di Sumatera, dan Lampung merupakan gerbang utama masuk ke Pulau Sumatera. Melalui peran distribusi pemerintah dalam memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, seharusnya pemerintah lebih optimal dalam pemerataan sumber-sumber ekonomi di Provinsi Lampung. Misalnya, memaksimalkan distribusi belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan untuk mendukung produktivitas masyarakat (Salman & Rasyidin, 2020).

Grafik 2. Pengeluaran Pemerintah 6 Kab/Kota Provinsi Lampung 2015-2019



Sumber : DJPK Kemenkeu RI,2021

Nadhifa Ramadanisa, 2022

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, yang berarti pemerintah telah meningkatkan belanjanya pada sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan IPM, tetapi sangat disayangkan, ketimpangan pengeluaran tersebut masih terjadi diantara kab/kota di Provinsi Lampung. Menurut Becker (1993) meningkatnya pengeluaran pemerintah baik itu pada sektor pendidikan maupun kesehatan berarti pemerintah sudah berusaha mendorong program pembangunan manusia untuk meningkatkan angka IPM, namun faktanya pengeluaran pemerintah yang meningkat, belum dapat meningkatkan capaian IPM Provinsi Lampung kepada posisi yang diharapkan dan mengakibatkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di kab/kota provinsi Lampung.

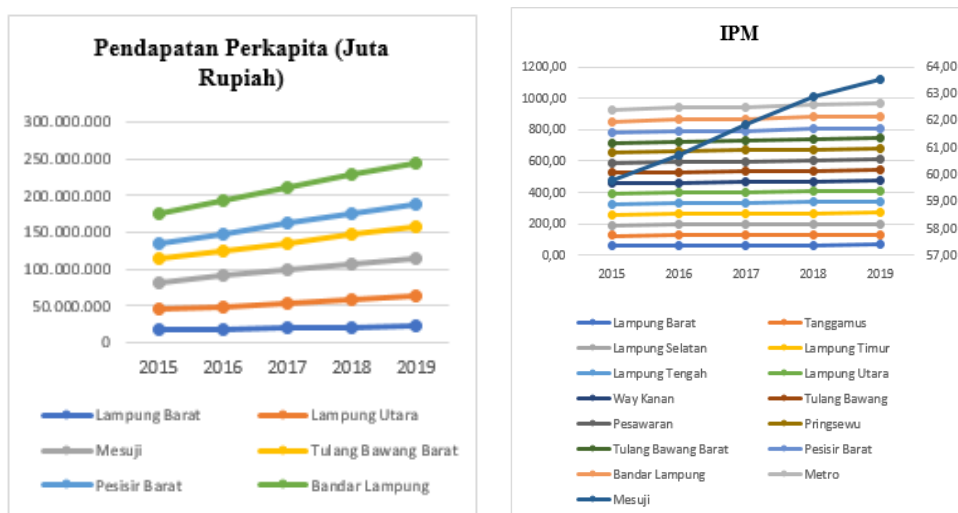
Pengeluaran sektor pendidikan terendah berada di kabupaten Pesisir Barat dengan pengeluaran pada tahun 2019 sebesar Rp.168 Miliar dan berbeda jauh jika dibandingkan kota Bandar Lampung pada tahun yang sama sebesar Rp.1,968 Triliun. Hal ini dapat terlihat dari output pengeluaran kabupaten Pesisir Barat yang berupa rendahnya angka partisipasi sekolah dibawah 12 tahun. Betapa tidak, angka harapan sekolah atau *Expected Years of School* (EYS) tidak memberikan kontribusi maksimal dalam penilaian IPM. Penyebabnya tak lain karena keterbatasan jumlah fasilitas pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga masyarakat mengalami keterbatasan untuk mengakses pelayanan pendidikan di kabupaten Pesisir Barat dan mengakibatkan belanja pemerintah di kabupaten ini tidak terlalu banyak pada sektor pendidikan.

Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 memiliki pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan paling tinggi sebesar Rp.1,100 Triliun dikarenakan pelayanan kesehatan masyarakat yang utama, berlokasi di kota ini sehingga pemerintah memfokuskan pengeluarannya untuk memenuhi sarana dan prasarana. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terendah berada pada kabupaten Mesuji, tulang bawang barat dan pesisir barat. Hal tersebut membuktikan bahwa di ke-3 kabupaten tersebut masih rendahnya umur harapan hidup dengan rata-rata 63-67 tahun. Penyebabnya tak lain

adalah sulitnya masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan yang sebagian besar hanya tersedia di ibukota kabupaten. Penyebab lain rendahnya umur harapan hidup di provinsi Lampung yaitu karena masyarakat yang kurang menghimbau program pemerintah mengenai pernikahan dini yang berpengaruh pada tingkat kematian bayi sehingga umur harapan hidup pun akan berkurang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan faktor lain yang dianggap penting untuk meningkatkan IPM selain anggaran di wilayah tersebut. Peningkatan perekonomian melalui barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan masyarakat setempat yang semakin tinggi, maka mencerminkan semakin tinggi juga PDRB perkapita yang dihasilkan di wilayah tersebut sehingga potensi sumber pendapatan daerah akan semakin besar dan akan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan di wilayah tersebut. Dengan demikian dapat dilihat bahwa PDRB perkapita sangat menggambarkan kesejahteraan masyarakat serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik kebutuhan pangan maupun non-pangan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Grafik 3. Pendapatan Perkapita 6 Kab/Kota Provinsi Lampung 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2021

Nadhifa Ramadanisa, 2022

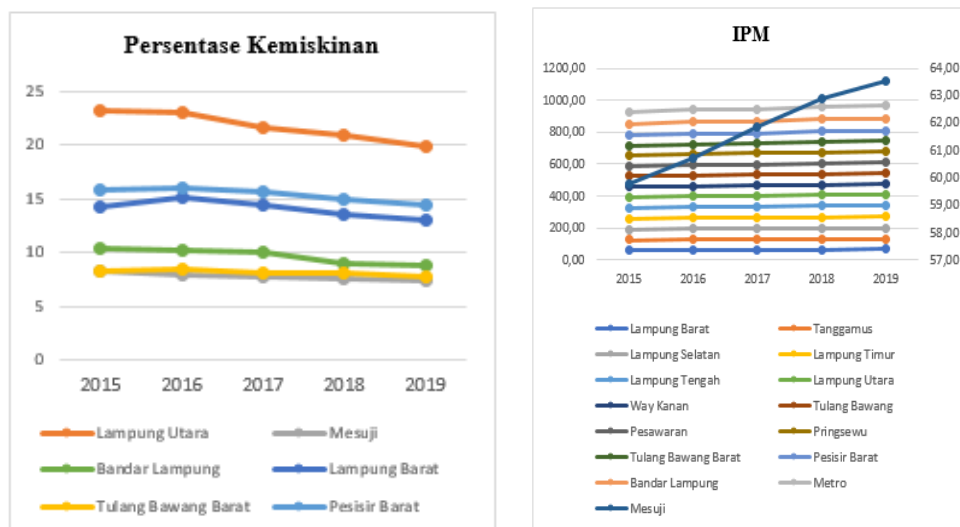
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pada Grafik 3 diatas, Perekonomian Provinsi Lampung terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini tercermin dari meningkatnya PDRB perkapita yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dan kemajuan. Menurut Becker (1993), pendapatan terus diperkapita setiap tahunnya mengalami peningkatan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berarti capaian IPM juga dapat meningkat, tetapi peningkatan angka pendapatan perkapita masih menunjukkan adanya perbedaan pergerakan antar wilayah di Provinsi Lampung. Pendapatan perkapita yang tinggi tidak selalu menggambarkan tingkat IPM yang tinggi pula seperti yang terjadi pada kabupaten Mesuji dan Lampung Barat.

Besaran angka pendapatan perkapita kabupaten Mesuji pada tahun 2019 sebesar Rp.52 juta dengan besaran angka IPM pada tahun yang sama yaitu hanya memberikan kontribusi sebesar 63,52. Hal ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan kabupaten Lampung Barat yang memiliki tingkat pendapatan perkapita pada tahun 2019 sebesar Rp. 23 juta dengan besaran angka IPM pada tahun yang sama sebesar 67,50. Hal ini dikarenakan masih banyaknya penduduk yang bekerja mengandalkan sektor pertanian sehingga pendapatan yang mereka terima bergantung pada berhasil atau tidaknya komoditas yang mereka tanam pada musim panen, dan disamping itu juga ketimpangan pendapatan antardaerah di provinsi Lampung diakibatkan oleh adanya perbedaan potensi sumber daya alam pada masing-masing daerah sehingga berpengaruh produktivitas masyarakat yang ada pada daerah tersebut dan akan berdampak pula pada kesejahteraan hidup masyarakatnya yang dapat dilihat dari menurunnya tingkat kemiskinan seperti yang dapat digambarkan pada grafik perkembangan tingkat kemiskinan berikut ini :

Grafik 4. Kemiskinan 6 Kab/Kota Provinsi Lampung 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2021

Pada Grafik 4 diatas, tingkat penduduk miskin terbanyak pada Provinsi Lampung berada di Kabupaten Lampung Utara, tetapi jika dilihat secara menyeluruh penurunan tingkat kemiskinan terdapat pada Provinsi Lampung di karenakan pada tahun 2015-2019 sedang dijalankan kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan dengan cara bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Dana Desa, Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun penurunan dikatakan lambat tetapi penurunan kemiskinan sendiri telah terjadi. Tetapi sangat disayangkan, pada tahun 2016 kabupaten Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Barat justru tingkat kemiskinannya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,1% yang disebabkan adanya permasalahan harga pada beberapa komoditas pangan. Fenomena ini tidak sejalan dengan teori kemiskinan Nurkse, dimana seharusnya kemiskinan setiap tahunnya menurun karena adanya bantuan dari pemerintah dan angka IPM mengalami peningkatan.

Peningkatan IPM belum tentu berdampak merata pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan antar kelompok masyarakat yang terjadi dalam kegiatan ekonomi daerah begitu besar. Konsekuensinya, daerah di Provinsi Lampung belum beranjak dari

kelompok menengah kebawah dalam soal capaian IPM. Hal itu terjadi ketimpangan dalam akselerasi pembangunannya. Angka kemiskinan yang turun di Provinsi Lampung tidak membuat IPM meningkat secara cepat, beberapa penyebabnya adalah rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat dan tidak meratanya dukungan sumber pendanaan dari pemerintah yang berdampak pada belum tercapainya kesejahteraan masyarakat sehingga masih diperlukan penangan pemerintah secara terintegrasi untuk mendorong peningkatan IPM.

Beberapa penelitian mencoba melihat Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan Perkapita, dan Kemiskinan terhadap IPM. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah yang dilakukan oleh Julita Senewe, dkk (2021), M.B Nani Ariani dan Indri Arrafi Juliannisa (2021), Desmintari dan Lina Ariyani (2019), Sal Diba Susen Pake, dkk(2018), Novita Dewi (2017), Agus Tri Basuki dan Endah Saptutyningsih (2016), Anisa Fahmi dan Khairul Amri Dalimunthe (2018), Lailan Syafrina Hasibuan, dkk (2020). Menyatakan bahwa variabel bebas yang digunakan pada penelitian memiliki pengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap variabel terikat, yaitu IPM. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukannya penelitian mendalam yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan penambahan literatur penelitian untuk meningkatkan IPM di Kab/Kota Provinsi Lampung. Dengan itu penulis tertarik melakukan penelitian ini yang berjudul **“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung”**.

I.2 Perumusan Masalah

Provinsi Lampung memegang nilai IPM terendah di Pulau Sumatera, Permasalahan pemerataan serta optimalisasi distribusi tingkat pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah setempat karena belum menghasilkan output yang maksimal, Sedangkan pada besaran Pendapatan Perkapita melalui PDRB Perkapita Provinsi Lampung masih mengalami ketimpangan antar Kabupaten/Kota yang artinya pemerataan kesejahteraan masih menjadi masalah utama yang menjadikan

tingkat kemiskinan pada Provinsi Lampung masih terbilang tinggi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap IPM di Provinsi Lampung?
4. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap IPM di Provinsi Lampung?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah, timbulah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor pendidikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor kesehatan terhadap IPM di Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap IPM di Provinsi Lampung.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan terhadap IPM di Provinsi Lampung.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan pada penelitian ini bisa menjadi referensi pada penelitian berikutnya dan penelitian ini diharapkan menjadi pembuktian Teori *human capital* dan Teori Lingkaran Kemiskinan mengenai IPM dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah,

Diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi pertimbangan atas upaya yang dilakukan untuk peningkatan pembangunan manusia pada

waktu yang akan datang dan meningkatkan kinerjanya dalam mencapai pembangunan manusia yang diharapkan.

b. Bagi mahasiswa,

Diharapkan pada penelitian ini dapat mendorong sikap mahasiswa yang kritis dan peka pada kenyataan yang terjadi masa ini khususnya permasalahan terkait pembangunan manusia seperti yang dibahas pada penelitian ini.